

BAB II

GAMBARAN UMUM KONFLIK SURIAH

Pada bab ini akan menjelaskan empat hal. Pertama, Latar belakang Suriah dibawah rezim Hafez Al-Assad dan Bashar Al-Assad. Kedua, Faktor dan penyebab konflik terjadi Suriah. Ketiga, Konflik Internal yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011. Keempat, Pengaruh Konflik Suriah di kawasan Timur Tengah.

A. Suriah Dibawah Rezim Assad

Menurut para ahli, konflik dari pemberontakan Suriah berawal sejak berdirinya Suriah di masa lalu. Suriah bergabung dengan Pan-Arabisme pada tahun 1958 – 1961, namun akhirnya memisahkan diri setelah kudeta militer yang dilakukan oleh Abdul Karim Nahlawy yang merupakan pengikut Syiah Alawiyah. Setelah kudeta tersebut, dunia politik Suriah dikuasai oleh *Hizb Al-Ba'ats Al-Isytiarki* yang merupakan partai sosialis yang mayoritas anggotanya merupakan penganut Syiah Alawiyah. Kelompok Syiah ini berhasil menguasai militer Suriah. Pada tahun 1963 pemerintah Suriah membuat kebijakan *Emergency Law* (Undang-Undang Darurat) yang dianggap membatasi ruang gerak masyarakat, termasuk kelompok penganut Sunni dibawah kepemimpinan Ikhwanul Muslimin.

Dalam bidang ekonomi, kelompok Syiah Alawiyah yang merupakan kelompok minoritas berhasil memegang kendali. Perekonomian utama Suriah yaitu pada sektor minyak dikuasai oleh keluarga, pejabat partai dan kelompok elit serta militer (LIPI, 2013). Didalam tubuh militer dan keamanan, 43% merupakan Sunni dan 37% Syiah Alawiyah, sedangkan dalam kementerian 58% Sunni dan 20% Alawiyah, sisanya diisi oleh Druze, Ismaili, dan Kristen (Kartaatmaja, 2014). Walaupun dianggap sebagai kelompok minoritas, namun kelompok Syiah berhasil mendapatkan peran penting pada

sektor-sektor penting dalam pemerintahan. Pengaruh Alawiyah terhadap penguasa Suriah dalam situasi politik pasca-kemerdekaan muncul pada awal 1970-an ketika Hafez al-Assad berkuasa sebagai Presiden.

Hafez Al-Assad yaitu ayah dari Bashar Al-Assad menjadi Presiden Suriah pada 22 Februari 1971, dan berkuasa sampai Juni 2000. Hafez Al-Assad merupakan mantan perwira angkatan udara Suriah dan merupakan pendiri partai Baath. Kekuasaannya yang lebih dari 30 tahun menjadikan Hafez Al-Assad sebagai tokoh yang paling berpengaruh di Timur Tengah. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif, hal ini memudahkan Hafez Al-Assad untuk mencalonkan penerusnya melalui partai Ba'ath. Sistem parlemen Suriah bernama majlis *al-Shaab* terdiri dari 250 kursi. Setiap anggota dipilih lewat pemilu untuk masa bakti 4 tahun (Hermawan, 2016).

Sejak partai Ba'ath berkuasa pada tahun 1963, Presiden Hafez Al-Assad menetapkan *Emergency Law* atau Undang-Undang Darurat. Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah yang hampir tidak terbatas untuk membatasi kebebasan individu dan untuk menyelidiki dan menahan tersangka yang beresiko mengancam keamanan nasional Undang-undang ini mengizinkan tersangka untuk diadili dan dijatuhi hukuman di pengadilan keamanan khusus di luar sistem peradilan pidana (Britannica, 2011).

Pemerintah Suriah berdalih bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mempertahankan keamanan nasional dari pesaingnya di wilayah tersebut yaitu Israel dan untuk memerangi militansi Islam yang masuk ke wilayah Suriah. Namun, dalam praktiknya, kekuatan Undang-Undang Darurat digunakan untuk melindungi kepentingan partai dengan memberdayakan pasukan keamanan untuk melecehkan, memenjarakan, dan membunuh kritikus pemerintah. Pemerintah juga membatasi kegiatan berbagai organisasi

advokasi termasuk kelompok hak minoritas dan kelompok pro-demokrasi.

Ketika menjabat, Hafez Al-Assad merupakan presiden yang diperhitungkan dalam politik Timur Tengah (Kuncahyono, 2012). Hafez Al-Assad sangat anti dan menentang tindakan agresi dan invasi yang dilakukan Israel dan propaganda zionis terhadap masyarakat dan negara-negara kawasan Timur Tengah Hal ini ditunjukkan pada tahun 1967, Suriah menunjukkan perlawanan terhadap Israel yang menyebabkan sebagian wilayah dataran tinggi Golan dikuasai Israel. Lalu pada tahun 1973 dimana Suriah berpartisipasi dalam perang *Yom Kippur* melawan Israel. Suriah juga melawan kelompok militer Israel di dalam perang saudara Lebanon pada tahun 1982 dalam rangka melindungi kelompok Syiah pada saat Israel melindungi kelompok Kristen (KabarIslamia, 2013).

Sejak tahun 1980, Hafez Al-Assad selalu menekankan kemajuan kekuatan militer Suriah agar bisa mengimbangi kekuatan militer Israel. Tahun 1985, Hafez Al-Assad menggunakan 35% anggaran belanja negara untuk membangun sektor pertahanan. Dia juga melakukan pinjaman dari negara-negara Soviet yang sebagian besar merupakan alat-alat persenjataan. Setahun setelahnya, Hafez Al-Assad juga menaikkan anggaran sektor pertahanan menjadi 56% dari seluruh APBN. Pada tahun 1988, Hafez Al-Assad juga bekerja sama dengan RRC perihal pembelian peluru kendali jarak menengah (Sihbudi, 1991). Hafez Al-Assad memilih menggunakan cara otoriter dan tidak berkompromi terhadap ancaman yang datang dari Israel untuk menyelamatkan kepentingan nasionalnya.

Hafez Al-Assad telah mempersiapkan putranya, Basil Al-Assad untuk menduduki kursi kepresidenan, namun dia meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1994, sehingga digantikan oleh adiknya yaitu Bashar Al-Assad yang saat itu sedang menempuh pendidikan dokter ahli mata

(*ophthamologist*) di London, diperintahkan kembali ke Suriah dan dilatih untuk dijadikan kandidat presiden selanjutnya. Agenda yang dimiliki Hafez Al-Assad mempunyai mekanisme bertahap untuk meneruskannya kepada putranya. Pertama, membentuk kekuatan, dukungan dan perlindungan dari bidang militer. Kedua, membuat dan membentuk image Bashar Al-Assad sebagai presiden yang ideal. Ketiga, Bashar Al-Assad mendalami ilmu tentang mekanisme negara.

Setelah Hafez Al-Assad memegang kekuasaan di Suriah selama 30 tahun terhitung sejak 1970 hingga dirinya meninggal dunia pada tahun 2000. Sebulan setelah kematian Hafez Al-Assad kekuasaan jatuh ditangan Bashar Al-Assad. Jabatan sebagai presiden ini di dapat dari hasil referendum yang juga dilaksanakan sebulan setelah kematian Hafez Al-Assad dimana Bashar mendapatkan 97% suara dan seminggu kemudian Bashar segera dilantik menjadi Presiden Suriah (Rosyada, 2017). Banyaknya suara dukungan terhadap Bashar Al-Assad tidak terlepas dari harapan masyarakat akan pemerintahan yang lebih demokratis karena Bashar Al-Assad memiliki latar belakang yang berbeda dengan ayahnya, sedangkan menurut ahli, dijadikannya Bashar Al-Assad menjadi presiden sudah diatur oleh ayahnya dan para pendukung rezim.

Pada tahun 2016, meskipun mendapatkan kecaman dari beberapa pihak, pemilu berhasil diadakan kembali di tengah konflik perang saudara yang terjadi di Suriah. Partai Ba'ath kembali berhasil memenangkan suara pemilu Parlemen. Menurut kepala komisis pemilu Suriah, Hisham al-Shaar, Partai Ba'ath bersama sekutunya berhasil memenangkan 200 dari 250 kursi parlemen (SindoNews, 2016). Bashar Al-Assad juga merombak kabinet kerja pemerintahan dua bulan setelah pemilu.

Sejak kepemimpinannya 16 tahun yang lalu, terhitung 12 kali terjadi *reshuffle* yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad. Menurutny, *reshuffle* merupakan langkah besar untuk

meningkatkan perekonomian negara yang sedang dilanda perang (SalafyNews, 2016). Namun, kemenangan partai dan seringnya terjadi *reshuffle* dalam tubuh pemerintahan, sering dianggap sebagai langkah Bashar Al-Assad untuk menempatkan orang-orang yang pro terhadap pemerintahannya untuk mempertahankan kekuasaannya.

Tabel 2.1 Penyebaran Kelompok Islam di Pemerintahan Suriah Tahun 2016

Religious group in Syria	Share in Syrian People's Council (April 2016), %	Share in the whole population, %
Alawites	8	10-15
Sunni	75	75
Druze	2	3
Christians	9	10
Shia	1	
Unknown	4	

Sumber: <https://orientalreview.org/2016/04/27/popular-representation-and-democracy-in-syria-end-of-alawite-dictatorship/> diunduh pada 9 Oktober 2017

Menurut table diatas pada tahun 2016, persentase masyarakat Syiah Alawiyah di Suriah hanya berjumlah 10-15%, hal ini membuktikan bahwa kaum penganut Syiah di Suriah sendiri merupakan kelompok minoritas. Namun dalam pemerintahan, jumlah penganut Syiah Alawiyah mencapai 8% dan merupakan persentasi tertinggi diantara penganut aliran lain. Hal ini juga ditunjang dengan posisi kelompok Syiah Alawiyah yang berada di posisi tinggi pemerintahan. Sehingga, dalam praktiknya, Bashar Al-Assad yang merupakan presiden sekaligus penganut aliran tersebut memegang kekuasaan di setiap pemilihan anggota maupun pengambilan kebijakan.

Sejak tahun 2012, presiden Bashar Al-Assad merubah amandemen konstitusi negara, jabatan presiden dibatasi satu periode yaitu tujuh tahun, kehidupan politik Suriah secara teori menjadi terbuka untuk masuknya partai politik lain, termasuk partai Sosialis Suriah dan Partai Komunis Suriah diizinkan untuk berpartisipasi. Secara mayoritas dewan perwakilan masyarakat di Suriah mayoritas dipegang oleh kelompok Sunni, namun kelompok Syiah Alawiyah Partai Ba'ath tetap memiliki kekuasaan di parlemen baik secara langsung maupun tidak langsung melalui partai sekutu dan anggota parlemen (Girling, 2016).

Selain itu, dalam mempertahankan pemerintahannya, Bashar Al-Assad juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara sekutunya seperti Iran, Rusia, dan China sebagai upaya mendapatkan dukungan di forum-forum internasional.

1. Rusia

Rusia merupakan salah satu negara pendukung Suriah diluar kawasan. Rusia kerap kali membela Suriah di forum internasional bersama dengan China dengan mengingatkan negara-negara lain untuk menghormati kedaulatan Suriah. Rusia menolak segala sanksi ekonomi dan politik yang diberatkan kepada Suriah. Hal ini tidak terlepas dari hubungan ekonomi dan militer Rusia yang sudah terjalin sejak perang dingin hingga sekarang. Dibuktikan dengan kamp militer Rusia yang berada di pelabuhan Tartus sejak tahun 1963 hingga sekarang. Pada tahun 2005, Rusia telah menghapus 75% hutang Suriah. Hingga tahun 2011, kontrak militer antara Rusia dan Suriah sudah mencapai angka 5 miliar USD, hal ini membuat Suriah sebagai negara importir senjata terbesar ke dua karena sebanyak 78% jumlah importnya berasal dari Rusia dan terus mengalami permintaan senjata terus meningkat hingga 580% dari tahun-tahun sebelumnya (Nandanaardi, 2014). Pada tahun 2015, Rusia melakukan serangan udara terhadap Suriah setelah sebelumnya Bashar Al-Assad meminta bantuan terhadap Suriah perihal kelompok ekstrimis ISIS di

Suriah. Rusia juga mengirimkan pasukan hantu (*Spetnaz*) yang ditugaskan untuk menjaga markas udara mereka dari sabotase kelompok pemberontak maupun ISIS (SindoNews, 2015). Sikap hubungan kerjasama ini saling menguntungkan karena Rusia tidak hanya menjaga kedaulatan Suriah, melainkan juga menjaga asset dan investasi perdagangannya.

2. China

China merupakan sekutu kedua Suriah diluar kawasan, China juga salah satu negara yang melakukan veto terhadap intervensi militer yang akan dilakukan terhadap Suriah sebagai upaya penyelesaian masalah yang diajukan oleh Liga Arab di PBB. Selain itu, Suriah dengan China memiliki hubungan bisnis yang baik bahkan sejak Damaskus menjadi Jalur Sutra. Kerjasama dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak sudah lama terjalin antara kedua negara. *China National Petroleum Corporation* dan *Royal Dutch Shell* di *Al -Furat Petroleum Company* adalah mitra perusahaan minyak nasional Suriah. Pada Tahun 2010 China adalah negara pengimpor kedua terbesar bagi Pemerintahan Bashar Al-Assad setelah Arab Saudi. Tercatat nilai impor Suriah terhadap China adalah 1,4 Milyar USD. Ekspor Suriah dari China mencapai 1% dari volume perdagangan sejumlah 5,6 juta USD. Sedangkan ekspor Suriah ke China mencapai 2,2 milyar USD (Nurfazlina, 2016). Selain itu, pada tahun 2016 China dikabarkan telah mengirimkan 5.000 pasukan khusus yang disebut "*Siberian Tiger*" dan "*Night Tiger*" ke Suriah dalam rangka menghabisi kelompok ekstrimis ISIS (EUTimes, 2015).

3. Iran

Sebagai negara sekutu dalam kawasan, Iran dan Suriah memiliki hubungan dekat dikarenakan Bashar Al-Assad memiliki kepercayaan yang sama dengan Iran yaitu Syiah. Sehingga, kesamaan ini yang membuat Iran kerap mendukung kuatnya rezim Bashar Al-Assad. Iran merupakan salah satu negara yang kuat secara pengaruh ideologi, ekonomi dan militer di kawasan Timur Tengah bersaing dengan Arab

Saudi. Menurut laporan, sejak 2012 Iran mulai mempersenjatai dan melakukan perkrutan terntara Afghanistan dan Pakistan serta kelompok Hizbullah untuk bergabung dalam pertahanan Bashar Al-Assad (CNN, 2016). Selain itu, Iran juga memberikan bantuan besar berupa udara. Iran memiliki peran penting hubungan kerjasama militer antara Rusia – Suriah, karena Iran mengizinkan wilayah udara mereka untuk dilewati pesawat Rusia.

Keberhasilan rezim Assad dalam mempertahankan kekuasaannya, tidak terlepas dari dukungan kelompok Alawiyah dan Parai Ba'ath yang berada di sektor-sektor pemerintahan. Selain itu, rezim Assad, tidak segan dalam melakukan pendekatan militer untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di negaranya. Dalam hubungan luar negerinya dengan negara-negara sekutu, rezim Assad selalu membentuk simbiosis mutualisme, dimana Suriah memilki daya tawar sumber daya alam yang dibutuhkan, sehingga negara sekutu tidak segan untuk memberikan bantuan kepada rezim Bashar Al-Assad (Brahmana, 2013). Meskipun Suriah sekilas merupakan negara yang kaya dan makmur dari luar, pada kenyataannya kemakmuran tersebut hanya dinikmati oleh orang-orang tinggal di Suriah dan Aleppo, dimana wilayah tersebut didiami oleh kelompok menengah ke atas, sedangkan wilayah-wilayah sekitarnya mengalami kemiskinan yang membuat permasalahan sosial kerap terjadi.

B. Konflik Internal Suriah

Gejolak yang terjadi di Suriah bukan pertama kalinya terjadi, pada saat Hafez Al-Assad berkuasa. Pada tahun 1970-an, kelompok *Syria Muslim Brotherhood* berkembang di kota Hama, Suriah, yang merupakan cabang *Muslim Brotherhood* dari Mesir. Kelompok ini mengehendaki reformasi politik, termasuk menuntut hak-hak sipil warga negara, dan menghentikan segala penyiksaan yang dilakukan oleh rezim terhadap masyarakat yang dianggap mengancam kursi kekuasaannya (Baiadawi, 2014). Awal tahun 1982, Muslim Brotherhood menyerang kelompok militer pemerintah Suriah

dan mengambil alih kota Hama. Presiden Hafez Al-Assad segera merespon tindakan dengan mengirim 12.000 tentara untuk mengepung dan menyerang kelompok tersebut. Terdapat perbedaan dalam perhitungan jumlah korban yang tewas dalam kejadian tersebut. Korban jiwa diperkirakan mencapai 20.000 jiwa. Kejadian ini menyebabkan Suriah mendapat julukan sebagai negara dengan polisi paling opresif (Wangke, 2012).

Sebelumnya, Suriah merupakan negara yang relatif stabil di mata dunia dibandingkan dengan negara-negara yang bernetabakan otoriter seperti Tunisia, Mesir dan Libya. Namun adanya fenomena *Arab Spring* mempengaruhi pandangan masyarakat Suriah terhadap kepemimpinan rezim Assad yang telah berlangsung sejak Hafez Al-Assad menjabat dan digantikan oleh anaknya, Bashar Al-Assad.

Kronologi konflik Suriah dimulai dari protes yang dilakukan oleh 15 anak dengan membuat coretan di dinding sekolah mereka bertuliskan "Rakyat Menginginkan Rezim Turun" pada tanggal 6 Maret 2011, yang sebelumnya pernah mereka lihat di televisi pada saat menyiarkan revolusi di Tunisia, Mesir dan Libya. Tindakan anak-anak tersebut membuat *Mukhabarat* yang merupakan badan intelejen Suriah melakukan penangkapan anak-anak tersebut (Rachmania, 2015). Namun pada saat ditahan, mereka dilaporkan mengalami penyiksaan saat diinterogasi. Perlakuan ini membuat orangtua dan masyarakat menentang tindakan pemerintah Bashar Al-Assad.

Pada tanggal 15 Maret 2011, terjadi protes yang dinamakan "*Day of Rage*" yang dilakukan setelah ibadah shalat Jum'at yang dilakukan umat Islam di Suriah. Sekitar 50 orang ditemukan tewas di sepanjang jalan kota Damaskus. Protes ini menuntut pembebasan tahanan politik yang dikriminalisasi oleh pemerintah serta pembebasan anak-anak yang ditangkap (Aljazeera, 2011).

Selanjutnya terjadi demonstrasi di kota Deera tanggal 18 Maret 2011 sebagai lanjutan dari demonstrasi sebelumnya. Demonstrasi ini disebut "*Day of Dignity*", aksi ini berjalan damai menyerukan perlawanan terhadap korupsi dan mendesak adanya kebebasan yang lebih luas dalam segala aspek ekonomi sosial dan politik. Masyarakat juga menuntut dicabutnya Undang-Undang Darurat (*Emergency Law*) yang memberikan wewenang kepada aparat untuk menangkap, menahan, dan menginterogasi seseorang tanpa adanya surat penangkapan. Namun, tentara menanggapi dengan melepaskan tembakan ke arah demonstran dan menewaskan tiga orang dalam peristiwa tersebut (Maklum, 2014).

Pada tanggal 29 April 2011, terjadi sebuah demonstrasi besar menuntut "kebebasan dan keadilan" dilakukan oleh ratusan orang di kota Deraa. Tentara pemerintah menyerang demonstrasi itu, dan menangkap 51 orang. Diantara yang ditangkap adalah seorang anak lelaki berusia 13 tahun bernama Hamzah Al-Khatib. Orang tua Hamzah Al-Khatib meminta aparat melepaskan anaknya. Permintaan itu ditolak. Beberapa hari kemudian anak itu dikembalikan kepada orang tuanya sudah menjadi jenazah. Tubuhnya dipenuhi bekas-bekas siksaan (Larson, 2016).

Peristiwa kematian Hamzah Al-Khatib memicu gelombang unjuk rasa di beberapa kota seperti Damaskus, Homs, Hama, Idlib dan Aleppo. Namun, aksi-aksi demonstrasi dijawab dengan penembakan, penangkapan dan penyiksaan oleh aparat pemerintahan dengan skala yang lebih luas. Kota Deraa yang menjadi titik mula pemberontakan menurut pemerintah Suriah dikepung kekuatan militer Suriah. Penangkapan oleh aparat pemerintah dilakukan kepada siapa saja yang menunjukkan perlawanan terhadap rezim.

Demonstrasi yang pada awalnya berlangsung damai, berubah menjadi gerakan-gerakan perlawanan sebagai konsekwensi dari tindakan represif aparat pemerintah. Masyarakat mulai mempersenjatai diri. Tuntutan masyarakat

semakin beragam. Mereka menuntut reformasi politik, demokrasi, penegakan HAM, hingga menuntut Bashar Al-Assad untuk mundur dari kursi kepresidenan.

Dalam rentang waktu awal kerusuhan hingga desember 2011, dilaporkan sekitar 6.000 orang tewas dalam aksi kekerasan yang terjadi di Suriah. Pemerintah Suriah mengklaim 1.000 orang diantaranya merupakan polisi dan tentara. Dewan Keamanan PBB mengatakan sekitar 14.000 orang ditahan dan 12.400 lainnya mengungsi ke negara lain (BBC, 2011).

Konflik Suriah juga dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM di Suriah sendiri sudah dimulai sejak adanya Undang-Undang Darurat yang diberlakukan sejak kepemimpinan Hafez Al-Assad. Namun dalam konteks Bashar Al-Assad, Pada kurun waktu kurang lebih 6 tahun pasca terjadinya konflik, Menurut laporan yang dimuat pada situs *Human Right Watch*, jumlah korban tewas akibat konflik tersebut pada february 2016 mencapai 470.000. meluasnya medan perang di Suriah telah menyebabkan krisis kemanusiaan. Sekitar 6,1 juta pengungsi internal dan 4,8 juta orang mencari perlindungan di luar negeri, menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN OCHA). Pada pertengahan 2016, diperkirakan 1 juta orang tinggal di daerah yang terkepung dan tidak bisa mendapatkan bantuan. Lebih dari 117.000 orang telah ditahan atau hilang sejak tahun 2011, sebagian besar kasus dilakukan oleh aparat pemerintah (HRW, 2017).

Kasus HAM di Suriah semakin menjadi sorotan dunia sejak terjadinya *Ghouta Chemical Attack* pada tanggal 21 Agustus 2013 yang merupakan penyerangan atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh partai oposisi dengan menggunakan roket yang mengandung senjata kimia, dalam hal ini adalah Gas Sarin. Perkiraan total kematian berkisar 281 hingga 1729 korban jiwa. PBB mengecam tindakan pemerintah Suriah tersebut dan menyetujui secara mutlak

kerangka kerja pemusnahan senjata kimia yang dimiliki Suriah (Steffy, 2014). Suriah dianggap telah melanggar pasal dalam Piagam PBB yang mewajibkan anggotanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Setelah mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat, Bashar Al-Assad menyetujui untuk memusnahkan 1.300 ton senjata kimia miliknya dibawah pengawasan PBB.

Namun pada tahun 2016, nama Bashar Al-Assad disebut-sebut oleh tim Penyelidikan gabungan PBB dengan tim pengawas senjata kimia *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW). Penyidik mendapatkan laporan Bashar Al-Assad setidaknya tiga kali menggunakan senjata kimia antara 2014 dan 2015. Oktober 2016, OPCW mengidentifikasi Divisi Angkatan Udara Suriah ke-22 dan Brigade Helikopter ke-63 telah menjatuhkan bom klorin ke permukiman warga. Dalam pernyataannya, Assad membantah melakukan serangan itu dan menyalahkan kelompok oposisi yang ingin menjebak pemerintah. Bantahan yang sama disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow, yang mengatakan racun kimia berasal dari gudang senjata pemberontak yang dihantam serangan udara Suriah (Kumparan, 2017). Sebelumnya, dalam kasus Suriah, OPCW tidak pernah menyebut nama Bashar Al-Assad dalam temuan-temuan buktinya, melainkan menggunakan istilah "Unit Militer". Hal ini disebabkan bahwa masih terdapat indikasi bahwa kelompok oposisi Suriah juga melakukan hal yang sama.

Kompleksitas dan eskalasi konflik yang memakan banyak korban jiwa di Suriah, menyebabkan Suriah banyak mendapatkan kecaman. Hal ini juga yang menjadikan pihak-pihak lain ikut serta dalam konflik yang terjadi di Suriah, baik dari negara-negara kawasan maupun dunia internasional.

C. Faktor-Faktor Konflik Suriah

Empat puluh tahun dibawah rezim keluarga Assad pembangunan sosial dan ekonomi Suriah terpuruk sehingga

menjadikannya negara berkembang berpendapatan menengah (Sulaeman, 2013). Sehingga ketidak puasan masyarakat ditunjukkan dengan munculnya demo anti-pemerintah dan turunnya rezim Assad. Kejenuhan politik terhadap kekuasaan rezim seiring dengan terjadinya gelombang *Arab Spring* yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah seperti Mesir, Libya dan Tunisia. Aksi demo terjadi di Suriah menuntut reformasi dan menginginkan runtuhnya rezim Bashar Al-Assad, diberlakukannya sistem demokrasi diantaranya kebebasan berbicara, mendirikan partai politik dan perbaikan ekonomi.

Tuntutan demokrasi yang terjadi di Suriah bukan merupakan faktor utama terjadinya konflik, namun tetap dianggap sebagai pemicu konflik. Terlebih ada aktor-aktor yang bermain dalam konflik yang terjadi di Suriah. Pada awalnya konflik dalam negeri ini terjadi antara pemerintah Bashar Al-Assad dengan kelompok oposisi yaitu masyarakat Suriah sendiri. Namun konflik ini meluas seiring dengan masuknya beberapa pihak yang ikut campur dalam konflik Internal Suriah.

Menurut Joserizal seorang aktivis kemanusiaan Mer-C mengatakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan konflik Suriah tidak kunjung usai. *Pertama*, Suriah merupakan negara yang kuat secara militer dan intelejen. *Kedua*, Suriah selalu melakukan perlawanan terhadap Israel. Hal ini menyebabkan pihak-pihak yang bersekutu seperti Israel, Amerika Serikat, Qatar, Arab Saudi dan Turki memberikan bantuan untuk mendukung pihak oposisi untuk menggulingkan Bashar Al-Assad (Kartaatmaja, 2014). Sehingga aktor atau negara-negara yang memiliki kepentingan merupakan faktor kuat yang menyebabkan konflik dan peperangan Suriah.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah permasalahan kepercayaan yang banyak terjadi di Timur Tengah. Dalam kasus Suriah yaitu dominasi kelompok minoritas Syiah Alawiyah atas politik Suriah dan sektor-sektor

perekonomian Suriah. Dominasi ini menimbulkan kecemburuan kelompok Sunni dan juga pembatasan gerak kelompok Ikhwanul Muslimin. Pemerintah Suriah Bashar Al-Assad yang merupakan Syiah Alawiyah di dukung oleh Iran dan Hizbullah. Sedangkan kelompok oposisi yang mayoritas Sunni diberikan bantuan oleh negara-negara penganut Sunni seperti Arab Saudi, Qatar, Turki dan Al-Qaeda, serta kelompok Zionis Israel.

Permasalahan Suriah sangat kompleks. Namun secara sederhana, sumber konflik yang terjadi di Suriah dapat dibagi menjadi dua yaitu berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri diantaranya terdapat permasalahan sosial, ekonomi dan politik. Diantaranya adalah tingginya angka pengangguran, inflasi berlebih, terbatasnya kesempatan mobilitas sosial dan berpolitik, serta aparat negara yang opresif. Pada 16 Juni 2000 Jean Shaoul dan Chris Marsden menyebutkan perekonomian Suriah dalam masa kesulitan diantaranya, produksi minyak turun menjadi 400,000 barel per hari, Suriah kesulitan menjalankan pelayanan publik karena mengalami krisis, angka kelahiran tinggi dan pendapatan perkapita menurun (Sulistio Hermawan & M. Nur Rokhman, 2016). Menurut laporan Komisi Sosial dan Ekonomi PBB untuk Asia Barat (ESCWA) dan Universitas St. Andrews, sekitar 83,4% warga Suriah hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini juga disertai 12,1 juta warga Suriah yang kesulitan mengakses air bersih, sanitasi dan toilet di tengah perang yang sedang terjadi. Kerugian infrastruktur akibat perang diestimasi mencapai 90 miliar USD. Dari sektor pertanian menurun hingga 60% yang disebabkan tingginya biaya irigasi yang menyebabkan harga beras dan tepung gandum melonjak hingga 89% dan 43% antara tahun 2010 – 2015 (MetroNews, 2016).

Lalu permasalahan yang datang dari luar negeri berupa kepentingan politik dan ekonomi. Ketakutan Arab Saudi dan negara Sunni akan meluasnya ajaran Syiah, Israel yang menginginkan ekspansi terhadap wilayah Suriah, serta

kepentingan negara-negara Barat atas sumber daya alam yang ada di Suriah (Sulaeman, 2013).

D. Pengaruh Konflik Suriah di Timur Tengah

Konflik yang terjadi di Suriah tidak terlepas dari fenomena revolusi menuntut demokrasi di Timur Tengah (*Arab Spring*). Pergolakan masyarakat menggulingkan rezim otoriter di Timur Tengah menyebabkan hal yang serupa terjadi di Suriah. Setiap aksi selalu menimbulkan reaksi dalam era globalisasi saat ini. Reaksi yang terjadi mempengaruhi pola hubungan, terutama dengan negara-negara terdekat. Begitu pula yang terjadi dengan konflik Suriah yang berpengaruh terhadap stabilitas negara-negara didalam kawasan, bahkan lebih luas secara global.

Konflik Suriah dianggap memberikan pengaruh besar terhadap negara-negara tetangga karena Suriah memiliki wilayah strategis yang berada di kawasan Timur Tengah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh konflik Suriah dianggap sebagai ancaman karena letak Suriah yang berdekatan dengan Israel, Irak, Palestina, Turki, Irak. Ancaman-ancaman berupa berupa intervensi, terorisme, separatisme dan migrasi pengungsi dipastikan mengganggu stabilitas kawasan.

Dampak Pengaruh ancaman konflik Suriah dirasakan langsung oleh Turki yang berbatasan langsung dengan wilayah utara Suriah. Pada 4 Oktober 2012 bom artileri milik Suriah mendarat di Turki dan menewaskan lima orang di kota Akcale. Lalu didalam negeri Turki sendiri terdapat aksi-aksi protes yang dilakukan oleh gabungan kelompok nasionalis, komunis dan islamis bergerak secara terorganisir yang menentang adanya penempatan rudal patriot NATO di perbatasan Turki – Suriah karena dianggap sbagai tindakan provokatif (Fikri, 2014). Adanya aksi-aksi protes masyarakat serta serangan-serangan yang jatuh pada wilayah Turki, mengisaratkan ancaman yang timbul akibat konflik negara tetangganya yaitu Suriah.

Kejadian yang sama terjadi di Irak, Israel, Libanon dan Jordania. Beberapa bom pernah meledak di wilayah perbatasan dengan negara Suriah. Hal ini menyebabkan banyak penduduk terluka akibat peperangan yang terjadi. Sehingga peningkatan keamanan wilayah terjadi dengan negara-negara yang mengirimkan tank dan peralatan berat militer ke perbatasan membuat keadaan kawasan Timur Tengah menjadi tegang sekaligus rapuh akan pecahnya konflik.

Selain permasalahan keamanan perbatasan wilayah, permasalahan lain yang timbul adalah isu pengungsi. Perhatian dunia internasional terhadap pengungsi semakin berkembang semenjak terjadinya fenomena *Arab Spring*. Diperkirakan 11 juta masyarakat telah meninggalkan Suriah sejak pecahnya perang sipil tahun 2011. Isu pengungsi memberikan dampak besar bagi negara penerima serta berpengaruh pada stabilitas sistem internasional. Menurut Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR), 4,8 juta orang telah melarikan diri ke Turki, Lebanon, Yordania, Mesir dan Irak. Arus pengungsi Suriah tidak hanya pada negara-negara tetangga, melainkan sudah meluas ke negara-negara lain. Sekitar satu juta telah meminta suaka ke Eropa. Menurut *European Migration Centre* dalam situs *syrianrefugees.eu*, sekitar 300.000 permintaan pengungsian diterima Jerman dan 100.000 masuk ke Sweida (Syrianrefugees, 2016). Isu pengungsi bukan hanya isu kemanusiaan, melainkan juga meluas ke ranah politik. Jika pertumbuhan populasi tidak diiringi dengan peningkatan produktifitas maka akan menjadi kehancuran bagi stabilitas domestik negara-negara penerima.

Banyaknya ancaman-ancaman yang terjadi akibat pengaruh dari konflik Suriah menyebabkan banyak negara-negara mempersiapkan diri dan menjaga perbatasan wilayah mereka dengan ketat. Selain ketidakstabilan domestik, hal ini juga mempengaruhi hubungan antar negara didalam kawasan terutama negara-negara yang berbatasan dengan Suriah. Alih-alih demi menciptakan perdamaian, banyak pihak-pihak asing ikut campur dalam konflik yang terjadi di Suriah, hal ini tidak

terlepas dari kepentingan nasional suatu negara untuk menjaga keamanan negaranya mauoun mendapatkan keuntungan dalam konflik tersebut.

Hubungan suatu kelompok yang berada di suatu negara di Timur Tengah berkecenderungan memiliki hubungan baik dengan kelompok lain atau kelompok yang sama di negara yang lain, seperti halnya Suriah. Hubungan ini biasanya terikat oleh kesamaan suku, aliran agama maupun kepentingan politik dan ekonomi. Salah satu negara yang ikut campur akibat kesamaan yang terjalin dengan pemerintahan Suriah adalah Iran. Sebagai negara Syiah terbesar dan berpengaruh, Iran juga merupakan sekutu yang paling dekat dengan rezim Bashar Al-Assad yang memiliki aliran kepercayaan yang sama yaitu Syiah. Di luar kawasan, Suriah memiliki sekutu yang berpengaruh dalam forum internasional, yaitu Rusia dan China yang diketahui sudah beberapa kali menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi yang ditawarkan PBB perihal penyelesaian konflik di Suriah dan kecaman terhadap rezim Bashar Al-Assad.

Keterlibatan langsung negara Iran sangat mengkhawatirkan negara-negara kawasan penganut Sunni lainnya, tidak terkecuali Arab Saudi yang merasa bersaudara dengan warga Sunni Suriah. Meskipun tidak secara terang-terangan seperti yang dilakukan Iran, namun Arab Saudi telah memberikan bantuan-bantuan besar terhadap kelompok oposisi. Bantuan-bantuan ini lah yang membuat kelompok anti-pemerintah ini semakin berani melawan kesewenangan kelompok militer pemerintah dan melengserkan rezim Bashar Al-Assad.

Namun keterlibatan ini yang menyebabkan konflik di Suriah tidak kunjung usai. Suriah menjadi medan pertempuran antara pihak pro pemerintahan yang didukung oleh Rusia, Iran dan China dengan oposisi yang didukung oleh Amerika Serikat, Arab Saudi dan negara Eropa lainnya. Suriah dianggap sebagai *proxy war* atau sebagai ajang adu kekuatan

negara-negara tertentu yang memiliki kepentingan. Bantuan berupa uang maupun bantuan-bantuan lain di bidang kemanusiaan dan militer, membuat kedua pihak antara kelompok pemerintah dan kelompok oposisi tidak kunjung berhenti untuk saling menyerang.